Article

Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2020

Miranti^{1*}, Laveria Sekarina¹

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara

*Correspondence Author: umbmiranti@gmail.com

Abstract: *Implementation of the Community-Based Total Sanitation Program (STBM) to Improve Community Health in Suka Maju Village, Rimbo Ulu District, Tebo Regency in 2020". The sampling technique uses purposive sampling, because in this purposive sampling technique it has been determined in advance who will be used as informants in this study, namely by taking subjects not based on random strata or regions but based on certain goals and doing it because of several reasons. considerations include the population selected for the sample can be selected in such a way according to predetermined criteria so that it will be relevant to the research plan, in accordance with the research objectives so that it is expected to be able to answer the problem with a sample of 9 people. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach, namely research methods carried out in natural conditions and seeing the symptoms that exist in the object of research to explore data sources by observation and interviews. Implementation of the Community-Based Total Sanitation Program (STBM) to Improve Community Health in Suka Maju Village, Rimbo Ulu District, Tebo Regency in 2020, namely through problem identification, sanitation mapping, triggering, and RKM preparation, these are the supporting factors in the implementation of the Community-Based Total Sanitation Program to realize an ODF Village.*

Keywords: *Implementation, Community Based Total Sanitation Program (STBM), Community Empowerment, Environmental Health, Public Health*

Abstrak: Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo tahun 2020". Teknik penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling, karena dalam teknik Purposive Sampling ini sudah di tetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dengan jumlah sampel 9 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah dan melihat gejala yang ada pada objek penelitian menggali sumber data dengan observasi dan wawancara. Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2020 yaitu melalui identifikasi masalah, pemetaan sanitasi, Pemicuan, dan Penyusunan RKM, inilah yang merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat guna untuk mewujudkan Desa yang ODF.

Kata Kunci: Penerapan, Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi dan terjamin kesehatan suatu masyarakat, maka tinggi pula kesejahteraannya. Menurut *World Health Organization* (WHO), sanitasi merupakan upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang akan menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan tubuh. Menurut WHO pula, kematian yang disebabkan karena *waterborne disease* mencapai 3.400.000 jiwa/tahun. Dari semua kematian yang bersumber pada buruknya kualitas air dan sanitasi, diare merupakan penyebab kematian terbesar yaitu 1.400.000 jiwa/tahun.¹ Pemanfaatan air yang tidak saniter atau tercemar mikroorganisme patogen penyebab diare dan didukung pola pengolahan makanan dan minuman yang tidak aman, serta personal hygiene yang tidak baik berakibat peningkatan kasus penyakit diare.²

Upaya peningkatan perilaku *Hygiene* dan peningkatan akses sanitasi terus dikembangkan. Pemerintah Indonesia mengembangkan program *Community Lead Total Sanitation* (CLTS) yang lebih berfokus pada perilaku stop BABS menjadi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat. STBM terdiri dari 5 pilar yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraannya, yang meliputi: (1) Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan), (2) CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), (3) PAM-RT (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga), (4) PSRT (Pengelolaan Sampah Rumah Tangga), (5) Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

Hampir 25 juta orang di Indonesia tidak menggunakan toilet. Mereka buang air besar di ladang, semak, hutan, parit, jalan, sungai atau ruang terbuka lainnya. Buang air besar sembarangan bukan hanya merendahkan martabat manusia, tetapi juga berisiko besar terhadap kesehatan anak dan masyarakat. Buang air besar sembarangan dan air limbah yang tidak diolah dapat mencemari pasokan air dan mendukung penyebaran penyakit diare seperti kolera. Seperempat dari semua anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia menderita diare, yang merupakan penyebab utama kematian anak di negara ini. Kualitas air yang buruk tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi. Sebuah survei air minum 2017 di Yogyakarta, sebuah pusat kota yang makmur di Jawa, menemukan bahwa 89 persen sumber air dan 67 persen air minum rumah tangga terkontaminasi oleh bakteri tinja.³ Untuk propinsi jambi, kondisi sanitasi masyarakatnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1 : Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, 2015-2018

Wilayah	Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen)			
	2015	2016	2017	2018
PROVINSI JAMBI	58.21	65.11	64.20	64.10
KERINCI	48.88	58.74	61.43	55.32
MERANGIN	34.42	49.05	54.68	49.49
SAROLANGUN	43.03	66.30	63.58	59.40
BATANGHARI	57.21	61.41	62.84	69.70
MUARO JAMBI	73.96	84.69	71.95	76.38
TANJUNG JABUNG TIMUR	35.44	29.59	34.34	36.47
TANJUNG JABUNG BARAT	49.29	56.12	57.34	53.92
TEBO	44.77	59.32	41.93	43.65
BUNGO	65.86	61.90	69.94	70.25
KOTA JAMBI	93.50	90.10	91.97	92.54

¹<http://lib.unnes.ac.id/28128/1/6411411249.pdf>

Diakses pada 03 November 2020, jam 21.25

²Strategi perubahan perilaku pemilihan septic tank di permukiman daerah rendah, "Jurnal Kesehatan Lingkungan", Vol. 14, No 2, Juli 2017. (<https://ejournal.kesling-poltekkesbjm.com/index.php/JKL/article/view/71>, Selasa, 01 Juni 2021. Pukul 20.08)

³<https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash>. Diakses pada 24 Desember 2020, jam 21.32

KOTA SUNGAI PENUH	64.78	73.88	72.09	74.73
-------------------	-------	-------	-------	-------

Sumber: BPS Jambi⁴

Dari data diatas tahun 2018, Kota Jambi memiliki persentase angka tertinggi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yaitu 92.54 persen. Kedua Kabupaten Muaro Jambi 76.38 persen, dan ketiga Kabupaten Bungo 70.25 persen. Sementara untuk Kabupaten Tebo 43.65 persen merupakan persentase angka terendah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi, setelah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 36,47 persen. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi buruknya kondisi sanitasi di Indonesia, yakni melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program ini di legitimasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.

Tabel 2 . Daftar Desa atau Dusun yang menerima Tanki Septic Individual maupun Komunal

NO	Nana Dusun/Kelurahan	Jenis Tanki Septic	Jumlah
1	Dusun Jambu	Ipal Komunal	1 Unit
2	Kelurahan Wirotho Agung	Ipal Komunal	1 Unit
3	Kelurahan Tebing Tinggi	Individual	107 Unit
4	Desa Suka Maju	Individual	103 Unit
5	Sungai Bengkal	Individual	103 Unit
6	Pulau Temiang	Individual	71 Unit

Desa Suka Maju merupakan salah satu Desa di Kabupaten Tebo yang memperoleh bantuan Jamban sehat berupa tanki septic dan klosed Desa ini memiliki luas wilayah 36.000 M², yang terdiri dari 1.858 KK, dengan jumlah penduduk 6.224 jiwa. Bisa terbilang Desa Suka Maju adalah Desa yang mandiri untuk akses sanitasi pada pilar pertama, pasalnya dari 1.858 KK, hanya 103 KK yang belum memiliki jamban sehat. Dan tujuan pemerintah dengan memberikan bantuan berupa sanitasi (jamban sehat) kepada masyarakat adalah dengan tujuan pemerataan dan keadilan, selain itu juga untuk merubah kebiasaan masyarakat yang masih BABS di rawa atau di sungai.⁵

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan STBM memiliki 5 pilar yang harus di terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit pada masyarakat. Untuk mencapai akses sanitasi yang layak pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah sanitasi yang belum layak. Untuk di Desa Suka Maju sendiri bantuan yang di berikan oleh pemerintah untuk memperbaiki akses sanitasi di masyarakat yaitu adanya program STBM atau bantuan berupa jamban sehat, dan bantuan berupa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka diare dan penyakit lainnya yang di tularkan melalui air dan lingkungan.

Dalam diskusi dengan aparat desa setempat, terlihat proses pelaksanaan terjadi *miss communication* antara tim pelaksana kegiatan di tingkat desa dengan fasilitator atau pendamping di tingkat kabupaten. Ini lah yang menyebabkan dalam proses pemasangan tanki septic, terjadi ketidak sesuaian dengan yang sudah di tetapkan dalam undang-undang. Padahal salah satu tujuan dari adanya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat itu sendiri, adalah untuk merubah pola fikir dari masyarakat untuk untuk melakukan hal tidak hanya menurut kebiasaan mereka sehari-hari.

Namun pada kenyataannya masyarakat masih melakukan perbuatan buang air besar sembarangan lebih cenderung ke sungai, tidak terbiasa cuci tangan pakai sabun, belum sadar pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, belum memiliki pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji

⁴<https://jambi.bps.go.id/dynamic/2019/10/08/1350/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jambi-2015-2018->. Diakses pada 26Desember 2020, jam 20.14

⁵Sumber : Profil Desa Suka Maju

Miranti^{1*}, Laveria Sekarina¹

Penerapan Program Sanitasi Total

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 4 No 1 Tahun 2022, p 73-96

Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju tahun 2020". Sehingga dapat menggambarkan kondisi sanitasi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Rumusan masalah penegasan atas pokok masalah yang akan dikaji yang diformulasikan dalam wujud pertanyaan yang memerlukan jawaban. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimana Penerapan Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di Desa Suka Maju? Bagaimana Upaya dalam penerapan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Suka Maju? Tujuan Penelitian adalah untuk menjelaskan penerapan program STBM untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Suka Maju dan untuk mengetahui upaya dalam penerapan program STBM untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Suka Maju. Adapun **manfaat penelitian** adalah setiap Kegiatan mempunyai nilai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya ilmu Teknologi Pendidikan dalam kawasan pengembangan khususnya perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan informasi yang dapat memberikan pelayanan prima (Service Excellence) kepada pemustaka serta pemanfaatan dan pengembangan media informasi di perpustakaan dalam memberikank kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran terutama dalam penyelesaian karya tulis ilmiah. Hasil penelitian diharap dapat berguna/ bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, diantaranya: Bagi pemerintah Desa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk memperbaiki kinerja program STBM selanjutnya. Bagi masyarakat, dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui seara objektif dan nyata pelaksanaan program STBM di Desa Suka Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Sehingga dapat ditindak lanjuti untuk membangun kesejahteraan. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta menjadi sumber pengetahuan. Bagi Universitas Muara Bungo, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.⁶ Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan atau memasang. Penerapan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho, penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁷ Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Unsur-unsur Penerapan

Menurut wahab, penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi : Adanya program yang dilaksanakan. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan amaupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan di atas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target. ⁸

⁶<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html?m=1> . Diakses pada 06 Desember 2020, jam 13.36

⁷Ibid

⁸Ibid

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Sanitasi dasar adalah sanitasi rumah tangga meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Berbasis masyarakat adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab dalam rangka menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Sanitasi total berbasis masyarakat merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

Program STBM mempunyai indikator outcome dan output. Indikator outcome yaitu menurunkan kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sedangkan indikator output yaitu setiap individu dan komunitas akses terhadap sarana sanitasi dasar untuk mewujudkan ODF (Open Defecation Free), setiap rumah tangga dapat menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman, setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum tersedia fasilitas cuci tangan sehingga semua orang dapat mencuci tangan dengan benar, setiap rumah tangga mengelolah limbah dan sampah dengan benar.⁹ Program Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dilakukan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan dalam pelaksanaannya terdapat 5 pilar yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga.

STBM dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat sadar, mau dan mampu untuk melaksanakan sanitasi total yang timbul dari dirinya sendiri, bukan melalui paksaan. Melalui cara ini diharapkan perubahan perilaku tidak terjadi pada saat pelaksanaan program melainkan berlangsung seterusnya. Metode yang digunakan dalam STBM adalah metode pemicuan. Metode pemicuan ini dilaksanakan oleh tim fasilitator dengan cara memicu masyarakat dalam memperbaiki sarana sanitasi sehingga tercapai tujuan dalam hal memperkuat budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta mencegah penyakit berbasis lingkungan.¹⁰

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres Desa Tertinggal (ITD). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan “saudara kembar” yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan. Robert Chamber sebagaimana diikuti oleh Kartasmita, “pemberdayaan” (*empowerment*) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat “*people centered participatory, empowering and sustainable*”¹¹

Sejalan dengan pemikiran itu, Stewart mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan keberdayaan.¹² Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya. Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti: Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran, dan lain-lain.

Beberapa komponen penting yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat yaitu (1) *Enabling*; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*). Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa

⁹E-BOOK “Kurikulum dan Modul pelatihan Fasilitator STBM, 2014”

¹⁰E-BOOK “Kurikulum dan Modul pelatihan Fasilitator STBM, 2014”

¹¹Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa : PUSTAKA PELAJAR*, Yogyakarta, 2010, hlm.45

¹²Ibid, hlm.46

daya, karena jika demikian maka dapat dikatakan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk memotivasi atau membangkitkan kesadaran akan potensi yang sudah dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. (2) *Empowering*; memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Penguatan ini meliputi langkah lebih nyata dan menyangkut penyediaan potensi berbagai masukan serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat berdaya upaya berupa peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi dan informasi, serta peningkatan pranata, kerja keras, hemat, keterbukaan dan bertanggungjawab.¹³ Sementara itu, dalam buku Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial, dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat.¹⁴

Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu penyandaran, menunjukkan adanya masalah, membantu pemecahan masalah, memproduksi dan mempublikasi informasi, melakukan pengujian dan demonstrasi, menunjukkan pentingnya perubahan dan akhirnya melaksanakan pemberdayaan atau penguatan kapasitas. Untuk dapat memaksimalkan pemberdayaan masyarakat diperlukan pendekatan-pendekatan berupa : Pendekatan mikro : berpusat pada petugas, pemberdayaan dilakukan terhadap penerima manfaat secara langsung berupa bimbingan, konseling, stress management dan crisis intervention. Pendekatan meso : dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat, pemberdayaan dengan menggunakan kelompok, berupa pelatihan dan pendidikan. Pendekatan makro : berupa perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobi-lobi, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik dan lain-lain.

Selain pendekatan-pendekatan diatas, diperlukan juga strategi pemberdayaan masyarakat berupa pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pembangunan usaha produktif dan penyedia tepat guna. Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Adisas Mita mengatakan bahwa "partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal."¹⁵

Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas dari pemerintah desa untuk melakukan integrasi dan aksi bersama dengan masyarakat. Untuk itu, dirasakan urgensinya mencari alat dan pendekatan baru serta tehnik-tehnik partisipasi. Lebih daripada itu, keterbukaan pemerintahan desa menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar.¹⁶

Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia dan juga merupakan ilmu dan seni mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan aman serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan memiliki tujuan sebagai berikut : Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang dan melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar

¹³E-BOOK "Kurikulum dan Modul pelatihan Fasilitator STBM, 2014"

¹⁴Abdulsyani, *Sosiologi* : PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.30

¹⁵Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* : Setara Pres, Malang, 2014, Hlm. 141

¹⁶Ibid, Hlm.162

wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.¹⁷ Adapun pengertian kesehatan menurut para ahli : Menurut Slamet Riyadi, ilmu kesehatan lingkungan ialah bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat yang khusus mempelajari dan menangani tentang hubungan manusia dengan lingkungannya untuk mencapai keseimbangan ekologi dan bertujuan untuk membina dan meningkatkan derajat maupun kehidupan sehat yang optimal. ¹⁸ Berbeda dengan HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) , kesehatan lingkunganialah suatu kondisi lingkungan yang sama dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. ¹⁹

Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan

Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterapkan dalam pasal 22 ayat (3) UU No 23 tahun 1992 ruang lingkup kesehatan lingkungan meliputi 8, yaitu :

1. Penyehatan Air dan Udara
2. Pengamanan limbah padat/sampah
3. Pengamanan limbah cair
4. Pengamanan limbah gas
5. Pengamanan radiasi
6. Pengamanan kebisingan
7. Pengamanan vektor penyakit
8. Penyehatan dan pengamanan lainnya, seperti keadaan pasca bencana

Adapun tujuan kesehatan lingkungan yang diantaranya yaitu: Melakukan korelasi, memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Untuk mencegah dengan cara mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari bahaya penyakit.²⁰

Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat menurut Profesor Winslow dari Universitas Yale, adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang dimasyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Tebo di Bidang Kesehatan

Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan, standard, proposal dan grand design. ²¹ Seorang pakar politik, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada suatu keputusan tersendiri.²²

Sementara itu, Thomas Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.²³ Kegiatan pemerintahan dan

¹⁷ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* : BUMI AKSARA, Jakarta Timur, 2017, hlm.179-180

¹⁸<https://www.gurupendidikan.co.id/kesehatan-lingkungan/> . Diakses pada 08 Desember 2020, jam 09.00

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

²¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik* : CAPS, Yogyakarta, 2012, hlm.19

²²*Ibid*, Hlm.20

²³*Sahya Anggara, Kebijakan Publik* : CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2014, hlm.35

pelayanan publik dengan demikian harus transparan dan akuntabel. Pemerintah dan birokrasinya harus menyadari bahwa warga memiliki hak untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan birokrasinya dalam menjawab kebutuhannya.²⁴ Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tebo, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kabupaten Tebo mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Kabupaten Tebo sebagai berikut :

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan umum, dengan fokus:

- a. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemanfaatan transportasi sungai, serta infrastruktur listrik dan air bersih.
- b. Meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
- c. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi guna mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan.
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pasar, dan tempat pelelangan.
- e. Percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya, dengan fokus :

- a. Penyusunan database tingkat pendidikan masyarakat
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas
- c. Pemerataan jangkauan akses terhadap pendidikan berkualitas
- d. Peningkatan pendidikan gratis dan berkualitas terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dari tingkat SD sampai SLTA
- e. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidikan kejuruan, terutama pendidikan perkebunan dan pengembangan ternak.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana ibadah
- g. Peningkatan kualitas keimanan
- h. peningkatan peran serta tokoh agama dalam pembangunan daerah
- i. meningkatkan prestasi pemuda di tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- j. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan ke semua wilayah Kabupaten Tebo.
- k. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang prima bagi semua penduduk

Meningkatkan pelayanan berobat gratis yang berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan.²⁵

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat status wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan, adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi Program Bantuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo untuk melihat implementasi dalam penerapan program STBM. Kurun waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai April 2021 yang dimaksud adalah waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data, baik data hasil pengamatan lapangan, data hasil wawancara, hingga penyusunan laporan penelitian. Metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data

²⁴Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm.167*

²⁵<https://tebokab.go.id/page/strategi-kebijakan.html> . Diakses pada 07 Desember 2020, jam 21.45

²⁶ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D : ALFABETA, Bandung, 2017, hlm.62*

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. ²⁷ **Miles dan Huberman**Data kuantitatif merupakan merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat, dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pemikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.²⁸

Menurut Sugiyono, sumber data penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer. Data primer yang digunakan adalah yang berasal dari hasil wawancara, sumber data yang dapat ditulis atau direkam. Wawancara akan dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara mengenai Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Sebagai Upaya Meniptakan Masyarakat Sehat di Desa Suka Maju. Dimana informan penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan keperluan penulisan penelitian yang memang mewakili sumber informasi yang ingin didapatkan oleh penulis. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Penerima Bantuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya, misalnya memvalidasi data hasil wawancara. Data-data tersebut dapat bersumber dari dokumentasi berupa majalah, surat kabar, buku arsip, situs dan sumber-sumber yang dapat diterima. Data sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder ini berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup undang-undang terkait, serta refernesi-referensi yang menjadi panduan.

Teknik pengumpulan data adalah sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : Teknik Observasi (pengamatan). Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik yang paling banyak dilakukan dalam penelitian salah satunya yaitu penelitian kualitatif, karena faktor terpenting dalam teknik observasi adalah observer (pengamat) dan orang yang di amati yang kemudian juga berfungsi sebagai pemberi informasi, yaitu informan.²⁹ Teknik Wawancara (interview), Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (interviewee) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁰ Wawancara tersruktur dilakukan oleh peneliti bila dia mengetahui secara jenis dan terperinci apa informasi yang dibutuhkan dan memiliki suatu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden.³¹

Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara mendalam dengan pedoman wawancara. Data yang akan dikumpulkan berkaitan dengan stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Dokumentasi, dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Seperti data jumlah masyarakat yang menerapkan perilaku stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti.

Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) karena dalam teknik *proporsive sampling* ini sudah ditetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan

²⁷Ibid, hlm.69

²⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial : Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.284*

²⁹ Sugiyono.2017. *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D : ALFABETA, Bandung, 2017, hlm.396.*

³⁰ Ulber Silalahi, *metode penelitian sosial : Refika.Aditama, Bandung, 2012, hlm.312*

³¹Ibid, hlm.313

dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian. Berikut daftar calon informan:

Tabel 3. Informan

NO	Nama	Status/Status Informan	Jumlah Orang
1	Fania Fujianti	Fasilitator KSM	1
2	Hari Anggoro	Kepala Desa	1
3	Sarwan	Ketua KSM	1
4	Chika Saputri	Sekretaris KSM	1
5	Sarmidi	Anggota KSM	1
6	Rubiyanto	Masyarakat Penerima	1
7	Ibu Fatimah	Masyarakat Penerima	1
8	Ibu Sri	Masyarakat Penerima	1
Jumlah			9

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud dan bukan rangkaian angka secara tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau klasifikasi. Data dalam wujud kata-kata mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara observasi wawancara biasanya diproses sebelum siap di gunakan pencatatan, pengetikan teks yang di perluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat bantu analisis.³² Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diterapkan dan diinterpretasi. Analisis data mempunyai dua tujuan, yakni meringkas dan menggambarkan data dan membuat infetensi dari data untuk populasi dari mana sampel ditarik. Analisis berarti kategoris, penataan, manipulasi dan peringkatan data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan peneliti. Kegunaan analisis ialah mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsirkan dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. ³³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden disajikan dalam pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian penulis mengerti akan kecenderungan jawaban dari responden untuk analisis berdasarkan argumen logika. Sedangkan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan, strategi dan program untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Perilaku hygiene dan sanitasi yang dimaksud antara lain tidak BAB sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. Perilaku tersebut merupakan serangkaian kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat. STBM. Merupakan suatu cara untuk memperbaiki lingkungan masyarakat agar menjadi sehat, terdiri dari 5 pilar. Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengamanan Sampah Rumah Tangga, dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga. Salah satu upaya dalam penerapan STBM di Desa Suka Maju yaitu dengan adanya program bantuan dari pemerintah berupa penggunaan Jamban sehat. Program ini bertujuan untuk pemeratakan penggunaan jamban untuk wilayah yang masyarakat nya masih BABS baik di rawa maupun di sungai. Selain bertujuan untuk pemeratakan penggunaan jamban sehat, program ini juga bertujuan untuk mengubah perilaku atau kebiasaan masyarakat melalui pemicuan.

³² Ulber Silalahi, *metode penelitian sosial* : Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.337

³³*Ibid*, hlm.339

Penerapan Program STBM Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju

Dalam penelitian ini akan di bahas mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti selama ini. Penerapan Program STBM Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dalam bidang pemerataan penggunaan jamban sehat, karena di Desa Suka Maju masih terdapat sanitasi yang di katakan belum layak atau kebiasaan masyarakat yang masih BABS di rawa. Sehingga pemerintah bekerjasama dengan pemerintah Desa untuk meratakan penggunaan jamban sehat di lingkungan Desa Suka Maju, agar tercapai tujuan dari STBM. Dengan adanya program bantuan dari pemerintah berupa program pemerataan penggunaan jamban sehat atau tangki septic. Hari Anggoro selaku Kepala Desa Suka Maju mengatakan :

*“Untuk wilayah Desa Suka Maju, khususnya masyarakat yang sebelumnya masih BABS di rawa, saya lihat ada kemajuan yaitu dengan memanfaatkan jamban yang sudah di berikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan berupa jamban sehat ini dapat di gunakan dengan baik oleh masyarakat dan bermanfaat. Dan saya berharap bukan hanya perilaku kebiasaan BABS sembarangan yang dapat di rubah, namun juga yang lainnya. Sehingga nantinya penerapan STBM dapat tercapai dengan baik, bukan hanya dalam bidang BABS saja”.*³⁴

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Maju dapat di simpulkan bahwasannya, bukan hanya dalam bidang BABS saja yang dapat dirubah perilakunya, namun juga kebiasaan yang lainnya. Sehingga pelaksanaan ke 5 pilar STBM dapat terlaksana dengan baik. Guna mencapai masyarakat sehat.

Identifikasi Masalah Pada Penerapan Program STBM

Berdasarkan Identifikasi masalah pada penerapan program STBM bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada suatu daerah yang dalam akses sanitasinya masih bisa di katakan kurang layak. Selain untuk mengetahui permasalahan, juga untuk mencari solusi agar daerah tersebut mendapatkan akses sanitasi yang layak. Dari adanya identifikasi masalah, dapat di ketahui pula masalah mengenai perilaku ataupun kebiasaan masyarakat. Seperti halnya mengidentifikasi masalah atau perilaku buruk yang masih di lakukan oleh masyarakat dalam BAB sembarangan. Padahal dapat kita ketahui bersama, bahwasannya BAB sembarangan dapat mencemari lingkungan terlebih lagi yang hidup di bantaran sungai. Karena air sungai yang mengalir juga di pergunakan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Apabila masyarakat terbiasa BAB sembarangan ke sungai, bukan hanya lingkungan yang tercemari, melainkan kesehatan mereka juga akan terancam. Untuk itu dalam tahap pengidentifikasian masalah, perlu adanya campur tangan dari masyarakat. Karena nantinya bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga akan kembali ke masyarakat. Dengan adanya campur tangan dari masyarakat langsung, diharapkan program ini tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat mengatakan :

*“dengan adanya identifikasi masalah pada penerapan program STBM bertujuan untuk mengetahui permasalahan atau hambatan apa saja yang di hadapi masyarakat untuk melaksanakan ke 5 pilar STBM. Dari adanya identifikasi masalah ini lah nantinya akan tercipta solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi di masyarakat”.*³⁵

Hasil wawancara dengan Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat dapat di simpulkan bahwasannya, identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang selama ini terjadi di masyarakat sehingga proses pelaksanaan STBM tidak dapat berjalan dengan baik. Dari identifikasi masalah inilah nantinya akan tercipta solusi yang dapat di terapkan guna untuk melaksanakan ke 5 pilar STBM.

³⁴Wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku Kepala Desa Suka Maju pada 01 April 2021 pukul 14.35

³⁵Wawancara dengan Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat dalam pelaksanaan program STBM di Desa Suka Maju 31 Maret 2021 pukul 11.25

Pemetaan Sanitasi

Pemetaan sanitasi adalah kegiatan partisipatif untuk menggambarkan masyarakat tentang kondisi terkini atau untuk mengetahui lokasi atau daerah yang masih bisa dikatakan belum layak dalam akses sanitasinya, dengan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat yang ada pada masyarakat tersebut. Pemetaan sanitasi juga berfungsi untuk melihat pengklarifikasian tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga memudahkan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan untuk mengetahui jumlah KK yang belum memiliki sarana jamban sehat. Dari pemetaan sanitasi ini juga lah yang mempermudah dalam pengajuan bantuan sehingga yang di ajukan tepat pada sasaran. Dalam pemetaan sanitasi pada kesempatan kali ini, terdata 103 KK yang belum memiliki akses jamban sehat. Dari 103 KK ini beberapa di antara nya memilih BABS ke sungai atau rawa. Dan sebagiannya lagi sudah memiliki akses jamban sendiri namun belum dapat di katakana layak, karena masih menggunakan jamban cemplung. Sarmidi selaku Anggota KSM mengatakan :

*“pemetaan sanitasi ini mempermudah dalam proses pendataan masyarakat yang belum memiliki akses jamban sehat, sehingga nantinya yang mendapatkan bantuan ini memang benar-benar orang yang membutuhkan dan tepat sasaran”.*³⁶

Hasil wawancara dengan sarmidi selaku anggota ksm dapat di simpulkan bahwasannya, pemetaan sanitasi bertujuan untuk memperoleh data jumlah masyarakat yang belum memiliki akses jamban sehat, sehingga dengan adanya pemetaan ini mempermudah dalam proses pendataan masyarakat, karena sudah adanya peta sanitasi yang didalam peta tersebut masyarakat sudah di klarifikasikan berdasarkan kesejahteraan.

Pemicuan

Metode yang di gunakan pada proses pemicuan dalam penerapan program STBM Stop BABS adalah pemicuan/ *participatory Rural Appraisal* (PRA). Pemicuan ini merupakan metode yang menumbuhkan partisipasi masyarakat secara aktif dengan pengetahuan mereka di harapkan masyarakat mampu membuat rencana mengenai kondisi sanitasi mereka. Pemicuan berbeda dengan penyuluhan, karena masyarakat di tuntut untuk lebih aktif dalam program Stop BABS ini. Pelaku pemicuan terdiri dari Tim Fasilitator Desa, Bidan Desa dengan di dukung oleh kepala desa melalui kegiatan posyandu, di harapkan dapat bertindak sebagai wadah kelembagaan yang ada di masyarakat yang akan dimanfaatkan sebagai tempat edukasi, pemicuan, pelaksanaan pembangunan, pengumpulan alternative pendanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat mengatakan :

*“Di harapkan dengan adanya pemicuan ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya STBM dapat berlangsung terus menerus, bukan hanya hari ini dan besok. Karena kesadaran dari masyarakat ini sendiri sangat penting dalam terlaksana nya penerapan program STBM. Namun yang saya lihat, sudah ada keinginan dari masyarakat dan terpancing untuk berubah dan memperbaiki kebiasaan dalam melaksanakan sanitasi 5 pilar, dari yang dulu nya malas mencuci tangan, sekarang di halaman depan rumah masyarakat mulai menyediakan tempat cuci tangan”.*³⁷

Hasil wawancara dengan Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat dapat di simpulkan bahwasannya, dengan adanya pemicuan dapat merubah perilaku atau kebiasaan buruk masyarakat guna mencapai ke 5 pilar STBM. Karena untuk mencapai ke 5 pilar dalam STBM, pertama yang harus di benahi adalah kebiasaan dari masyarakat itu sendiri.

Penyusunan RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat) / Penyusunan Anggaran

RKM adalah dokumen rencana kegiatan masyarakat yang di susun secara partisipatif dengan mengakomodinir kebutuhan masyarakat. RKM merupakan dokumen resmi sebagai bukti

³⁶Wawancara dengan Bapak Sarmidi selaku Anggota KSM tanggal 03 April 2021 pukul 15.00

³⁷Wawancara dengan Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat dalam pelaksanaan program STBM di Desa Suka Maju 31 Maret 2021 pukul 11.25

kesungguhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sekaligus sebagai dasar pemangku kepentingan yang telah memberikan komitmen. Dokumen ini disusun oleh KSM yang di dampingi Fasilitator Masyarakat.

Penyusunan RKM dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan penyusunannya, baik manajemen maupun teknis, pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis dibantu oleh TFL Teknis sebagai pendamping, dengan tetap melibatkan masyarakat. Sarwan selaku Ketua KSM mengatakan :

“Dalam hal pembuatan RKM ini perlu adanya keterlibatan masyarakat, karena nantinya masyarakat inilah yang akan mengelola dan memanfaatkan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, di harapkan dalam proses pelaksanaannya sesuai dan tepat sasaran. Selain itu juga bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat tentang kondisi, permasalahan dan untuk menampung aspirasi dari masyarakat itu sendiri.”³⁸

Hasil wawancara dengan Sarwan selaku Ketua KSM dapat di simpulkan bahwasannya, dalam pembuatan RKM sangat di perlukannya partisipasi dari masyarakat. Agar nantinya bantuan yang di berikan tepat sasaran dan teapan guna. Sementara itu, untuk pendanaan dalam pelaksanaan program ini di lakukan untuk eksplorasi serta promosi sector terkait serta sumber-sumber lain yang ada di masyarakat, termasuk juga kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong. Pendanaan yang bisa di manfaatkan bagi pelaksana program STBM dapat bersumber dari:

1. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kementerian kesehatan direncanakan serta di kelola untuk perencanaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring di kabupaten dan provinsi.
2. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bisa digunakan untuk mendukung pengembangan sanitasi.
3. Dana Desa yang dikelola oleh Kepala Desa, yang didasarkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Pelaksanaan

Dalam penerapan program STBM pilar pertama, dalam proses pelaksanaannya melibatkan masyarakat langsung. Kontribusi dari masyarakat sangat di perlukan dalam kegiatan ini, dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Semakin besar kontribusi masyarakat semakin tinggi komitmennya untuk memiliki dan bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan. Karena pada dasarnya kegiatan ini mengacu pada pemberdayaan masyarakat guna merubah perilaku atau kebiasaan dengan cara pemicuan. Dalam pelaksanaan program bantuan dari pemerintah di bidang sanitasi, selain kontribusi masyarakat, dalam proses pelaksanaannya juga melibatkan pihak ketiga (kontraktor). dimana peran dari kontraktor ini sendiri adalah untuk menyuplai bahan berupa tanki septic yang akan di pergunakan dalam bidang sanitasi khususnya pilar pertama. Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat mengatakan :

*“Dalam pelaksanaannya sudah bagus, hanya saja untuk komunikasi antar Tim pelaksana ini yang perlu di benahi. Karena masih saling mengedepankan ego masing-masing sehingga menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat berjalannya kegiatan, dan karena kesalah pahaman antar tim pelaksana inilah yang sangat menghambat dalam proses pelaksanaan program”.*³⁹

Hasil wawancara dengan Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat dapat di simpulkan bahwasannya, dalam pelaksanaan program STBM ini perlu adanya kekompakan dan dukungan yang kuat baik dari pemerintah desa, tim fasilitator, maupun tim pelaksana kegiatan. Bukan hanya dukungan, komunikasi yang baik juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan program.

³⁸Wawancara dengan Bapak Sarwan selaku Ketua KSM tanggal 02 April 2021 pukul 15.10

³⁹Wawancara dengan Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat dalam pelaksanaan program STBM di Desa Suka Maju 31 Maret 2021 pukul 11.25

Namun demikian kegiatan ini mengacu pada pemberdayaan masyarakat sehingga dalam pengerjaannya pun juga di serahkan kepada masyarakat baik dalam penggalian lubang untuk tempat tanki septic, pemasangan klosed, pipa, pengecoran lantai klosed dan pemasangan tanki septic bersama Tim KSM yang di damping oleh fasilitator.

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program, itu berarti secara tidak langsung menumbuhkan sikap memiliki. Yang artinya setiap masyarakat yang menerima terpancing untuk ikut andil dalam proses pengerjaan. Karena bantuan yang di turunkan oleh pemerintah dalam bentuk material hanya berupa tanki septic, klosed, pipa, semen, dan pasir. Sementara untuk atribut pendukung seperti dinding dan atap nya, itu di kembalikan oleh masyarakat. Di sinilah peran rasa memiliki setiap individu di bentuk, ketika masyarakat merasa memiliki, masyarakat akan lebih menjaga apa yang telah di berikan. Rubiyanto selaku penerima manfaat mengatakan :

“saya mengucapkan terimakasih dan alhamdulillah, karna sudah di bantu. Dengan adanya klosed ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami. Jadi kalo BAB sudah tidak ke rawa lagi, karena dengan adanya bantuan ini juga meringankan biaya dalam pembuatan sanitasi atau jamban yang layak”.⁴⁰

Hasil wawancara dengan Rubiyanto selaku penerima manfaat dapat di simpulkan bahwasannya, bantuan berupa jamban sehat bermanfaat dan berguna, ketika dalam proses pemetaan sanitasi tepat, penerima bantuan juga akan tepat pada sasaran sehingga apa yang sudah di berikan oleh pemerintah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Seperti kebanyakan pada pelaksanaan kegiatan, mustahil apabila pada sebuah kegiatan berjalan mulus tanpa hambatan. Demikian halnya pada pelaksanaan program STBM pilar pertama, karena kurangnya pemahaman Tim pelaksana atau KSM dalam pemasangan tanki septic maupun dalam tahap pelaporan menyebabkan Tim pelaksana harus bekerja dua kali karena ada ketidak sesuaian antara apa yang sudah di tetapkan dalam peraturan dengan apa yang di laksanakan.

Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang akan dilakukan secara terus menerus untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan dilakukan di sepanjang siklus program, dimulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Chika Saputri selaku Sekretaris KSM mengatakan :

“setelah selesai proses pelaksanaan kegiatan, kami masih memantau masyarakat. Apakah bantuan yang sudah di berikan di gunakan dengan baik atau tidak, mudah-mudahan dengan adanya bantuan tanki septic ini bisa merubah kebiasaan masyarakat yang BABS ke rawa”.⁴¹

Hasil wawancara dengan Chika Saputri selaku Sekretaris KSM dapat di simpulkan bahwasannya, Pemantauan bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan masyarakat setelah memperoleh bantuan jamban sehat, dan dari proses pemantauan inilah nantinya akan terlihat keberhasilan dalam proses pemicuan terlaksana dengan baik atau tidak. Tujuan dari pemantauan :

1. Memastikan bahwa kemajuan pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari jadwal yang telah ditentukan pada setiap tahapan kunci dalam rencana induk
2. Memastikan proses fasilitasi kegiatan pelaksanaan siklus sesuai pedoman teknis yang ada, sehingga capaian substansi sesuai indicator yang telah ditentukan
3. Memastikan setiap kerangka acuan yang disusun untuk dilaksanakan berdasarkan pada koridor yang telah ditentukan.

Dalam pemantauan oleh tim KSM setelah kegiatan selesai di laksanakan, dari 103 KK yang menerima bantuan jamban sehat terdapat salah satu masyarakat yang tidak berani untuk menggunakan jamban tersebut, dengan alasan takut. Setelah di temukan permasalahan yang ada di

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Rubiyanto selaku penerima manfaat tanggal 01 April 2021 pukul 16.00

⁴¹Wawancara dengan Chika Saputri selaku sekretaris KSM di Desa Suka Maju pada 31 Maret 2021 pukul 16.00

masyarakat, tim KSM melaporkan hal ini ke Kepala Desa guna memecahkan persoalan yang ada. Dengan adanya pemantauan ini, pemerintah desa dapat mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat setelah selesai pelaksanaan program. Dengan adanya pemantauan ini lah yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya dalam pembuatan perencanaan pembangunan. Hari Anggoro selaku Kepala Desa Suka Maju mengatakan :

*“saya mengucapkan terimakasih kepada tim KSM yang telah bekerjasama dengan pemerintah desa dalam mengawasi proses pemantauan di masyarakat. Karena adanya pemantauan inilah bisa kita ketahui bersama permasalahan yang ada di masyarakat. Nantinya ini akan menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah desa kedepannya dalam perencanaan pembangunan. Seperti permasalahan salah satu penerima manfaat yang tidak berani menggunakan tanki septic, jika tidak ada laporan dari tm pelaksana, kami pemerintah desa tidak akan mengetahui hal ini. Sehingga nantinya bisa kita alihkan ke bantuan jamban sehat dengan model yang sederhana tidak menggunakan tanki seperti ini”.*⁴²

Hasil wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku kepala desa suka maju dapat di simpulkan bahwasannya, dalam proses pemantauan juga diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan tim pelaksana, sehingga dalam proses pemantauan dapat berjalan dengan baik. Bukan hanya itu, pemantauan ini juga berfungsi untuk melihat seberapa jauh kebermanfaatan program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan ketika di temukan permasalahan nantinya, akan di bicarakan atau di msuyawarakan oleh pemerintah desa guna memecahkan permasalahan dan untuk mencari solusi.

Kondisi Eksternal

Peluang

Masyarakat

Dalam pengentasan masalah sanitasi total berbasis masyarakat di daerah desa suka maju kecamatan rimbo ulu, masyarakat berperan penting dalam proses pelaksanaannya. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, mustahil program bantuan sanitasi total berbasis masyarakat dapat berjalan dengan baik. Karena yang menjadi sasaran dari bantuan ini sendiri adalah masyarakat. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Sarmidi selaku Anggota KSM mengatakan :

*“Dalam hal pengentasan masalah sanitasi, masyarakat bisa menjadi peluang dalam tercapainya program sanitasi yang meliputi 5 pilar. Yaitu melalui dukungan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan pola hidup sehat. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam mengatasi masalah STBM salah satunya kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri akan bahaya yang di timbulkan apabila tidak menerapkan pola hidup sehat, selain itu juga kebiasaan dari masyarakat kaum awam yang sulit untuk dirubah.”*⁴³ Hasil wawancara dengan Chika Saputri selaku Sekretaris KSM dapat di simpulkan bahwasannya, masyarakat bisa menjadi peluang namun juga tidak menutup kemungkinan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program STMB yang meliputi 5 pilar.

Sanitarian

Dalam proses pengimplementasian program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Suka Maju di butuhkan tenaga sanitarian disetiap puskesmas agar dapat mengkafer pelaksanaan program dilapangan, sebab kebijakan STBM pada pilar Stop BABS merupakan tindakan preventif untuk melakukan perilaku masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan. Harapan dapat berhasilnya program STBM ini dengan menempatkan seluruh puskesmas mempunyai tenaga sanitarian meskipun hanya satu orang. Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat mengatakan :

⁴²Wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku Kepala Desa Suka Maju pada 01 April 2021 pukul 14.35

⁴³Wawancara dengan Bapak Sarmidi selaku Anggota KSM pada 03 April 2021 pukul 15.00

“Sebaran Tenaga di puskesmas saat ini belum merata, sehingga pelaksanaan program belum maksimal. Sementara tenaga lain diluar sanitarian hanya sebatas diperbantukan untuk menjalankan program kesling namun tenaga tersebut lebih cenderung mengutamakan tindakan kuratif sesuai dengan profesinya”.⁴⁴

Hasil wawancara dengan Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat dapat di simpulkan bahwasannya, kurangnya tenaga sanitarian di setiap puskesmas menyebabkan pelaksanaan program belum maksimal sehingga belum dapat mengkafer program yang ada di lapangan.

Dinas Kesehatan

Selain dari masyarakat, sanitarian, perlu juga adanya dukungan dari dinas kesehatan terkait masalah pengentasan sanitasi total berbasis masyarakat. Baik melalui sosialisasi yang digalakkan dalam kegiatan posyandu atau melalui program PKK. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan sangat di perlukan oleh masyarakat, karena pengetahuan masyarakat yang masih minim akan kesehatan, baik kesehatan lingkungan maupun kesehatan masyarakat itu sendiri. Hari Anggoro selaku Kepala Desa, Desa Suka Maju mengatakan :

*“Upaya dalam hal mencanangkan program STBM selain adanya dukungan dari masyarakat, tenaga sanitarian, juga perlu adanya kerjasama atau dukungan dari dinas kesehatan. Karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat, untuk itu perlu di adakannya sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya sanitasi”.*⁴⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku Kepala Desa, Desa Suka Maju dapat disimpulkan bahwasannya, perlu adanya dukungan dari beberapa pihak baik dari masyarakat, tenaga sanitarian dan dinas kesehatan dalam mencanangkan program STBM guna mencapai pola hidup sehat di Desa Suka Maju.

Hambatan/Ancaman

Luas Wilayah

Dalam hal ini luas wilayah menjadi salah satu hambatan dalam pengentasan masalah sanitasi total berbasis masyarakat. Karena suatu daerah yang memiliki cakupan wilayah yang luas, menyebabkan pemerintah desa kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan sanitasi yang baik. Untuk itu perlu adanya kerjasama antar pemerintah desa dengan ketua RT guna mengawasi perkembangan sanitasi di lingkup RT masing-masing-masing. Dengan begitu di harapkan menjadi salah alternatif dalam pemantauan program sanitasi. Sarwan selaku Ketua KSM mengatakan :

*“Luas wilayah menjadi salah satu permasalahan dari tidak meratanya pembagian bantuan berupa pembuatan jamban sehat yang diberikan oleh pemerintah, karena Desa Suka Maju memiliki wilayah yang cukup luas sehingga tidak semua wilayah dapat di jangkau oleh pemerintah desa. Terlebih lagi jika tidak adanya laporan dari ketua RT setempat. Juga adanya luas wilayah ini menyebabkan sulitnya pendataan kepada masyarakat karena penerima bantuan jamban sehat kebanyakan tersebar di wilayah yang sulit di jangkau terlebih lagi jika musim hujan”*⁴⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Sarwan selaku Ketua KSM dapat di simpulkan bahwasannya, luas wilayah menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pelaksanaan program STBM karena tidak semua wilayah dapat di jangkau oleh pemerintah desa, terlebih lagi jika tidak adanya laporan dari masyarakat maupun ketua RT setempat.

2. Jumlah Penduduk

⁴⁴Wawancara dengan Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat dalam pelaksanaan program STBM di Desa Suka Maju 31 Maret 2021 pukul 11.25

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku Kepala Desa Suka Maju pada 01 April 2021 pukul 14.35

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Sarwan selaku Ketua KSM tanggal 02 April 2021 pukul 15.10

Pada hal ini jumlah penduduk mempengaruhi dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam menciptakan sanitasi yang baik. Bukan hanya itu, kepadatan penduduk dapat menyebabkan eksploitasi terhadap lingkungan alam yang berlebihan sehingga dapat merusak lingkungan itu sendiri. Karena dengan semakin banyaknya penduduk semakin banyak lahan yang habis di gunakan untuk pemukiman, ini merupakan pemicu terjadinya lingkungan kumuh apabila tidak mendapat perhatian dari pemerintah desa. Chika Saputri selaku Sekretaris KSM mengatakan

"Jumlah penduduk menjadi salah satu hambatan terlaksananya pemerataan pembuatan jamban sehat, pasalnya bantuan yang di berikan oleh pemerintah terbatas. Sementara jumlah penduduknya banyak, sehingga kami tim pelaksana program pembuatan jamban sehat harus selektif dalam menentukan mana yang harus di dahulukan untuk memperoleh bantuan. Karena jika tidak selektif akan terjadi kericuhan di masyarakat karena di nilai tidak adil atau akan terjadi kesenjangan sosial".⁴⁷

Hasil wawancara dengan Chika Saputri selaku Sekretaris KSM dapat di simpulkan bahwasannya, jumlah penduduk menjadi faktor penghambat dalam terlaksananya pemerataan jamban sehat. Karena jumlah penduduk yang cukup banyak sementara bantuan yang diberikan oleh pemerintah terbatas sehingga tim pelaksana harus jeli dalam menentukan penerima manfaat atau penerima jamban sehat agar tidak terjadi kericuhan atau kesenjangan di masyarakat.

Kondisi Internal Kekuatan Dana Desa

Dengan adanya dana desa membantu masyarakat dalam memperoleh infrastruktur sebagai penunjang terlaksananya kegiatan sanitasi yang meliputi 5 pilar. Pembangunan sanitasi layak harus di prioritisasikan dalam kegiatan pengembangan desa agar masyarakat tidak beresiko terjangkit penyakit akibat kelalaian menjaga kebersihan dan sanitasi. Untuk pembangunan sanitasi salah satunya dengan memanfaatkan dana desa. Selain itu juga dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat guna memanfaatkan sampah rumah tangga agar dapat di daur ulang, sehingga nantinya sampah tersebut memiliki nilai jual. Dari pelatihan pengolahan sampah inilah salah satu upaya untuk meningkatkan sanitasi yang baik. Hari Anggoro selaku Kepala Desa, Desa Suka Maju mengatakan :

"Salah satu upaya yang dapat di lakukan untuk pengentasan masalah sanitasi yang meliputi 5 pilar yaitu dengan menyediakan Dana Desa untuk pembangunan fasilitas seperti pembuatan bak pembuangan sampah umum, pembuatan CTPS di tempat-tempat umum seperti masjid, pasar. mudah-mudahan dapat di pergunakan dengan baik oleh masyarakat dan dapat mengubah kebiasaan pola hidup masyarakat agar menjaga kebersihan diri dan lingkungan".⁴⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku Kepala Desa, Desa Suka Maju dapat disimpulkan bahwasannya, guna membantu dan merubah pola hidup masyarakat agar menjaga kebersihan diri dan lingkungan pemerintah desa membangun fasilitas CTPS dan bak pembuangan sampah umum melalui Dana Desa. Dengan terbangunnya fasilitas umum sebagai penunjang terciptanya pola hidup sehat di harapkan masyarakat dapat tergerak hatinya untuk melakukan kebiasaan yang baik yaitu dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

Kebijakan

Upaya merealisasikan tujuan pembangunan manusia melalui program sanitasi yang berhasil. Pembangunan kesehatan memainkan peran sentral dalam upaya mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik sebagai tujuan mendasar dalam kehidupan. Agar mencapai sasarannya, upaya pembangunan kesehatan perlu dilandaskan pada paradigma kesehatan yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan agar berbagai program pembangunan kesehatan menjadi lebih terarah dan berdaya guna.

⁴⁷Wawancara dengan Chika Saputri selaku Sekretaris KSM tanggal 31 Maret 2021 pukul 16.00

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku Kepala Desa Suka Maju pada 01 April 2021 pukul 14.35

Salah satu upaya untuk mengatasi sanitasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan nasional pembangunan air minum dan sanitasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan sanitasi sebagai upaya untuk mencapai akses universal. Hari Anggoro selaku Kepala Desa, Desa Suka Maju mengatakan :

“selain dengan memanfaatkan dana desa sebagai penunjang terciptanya kebiasaan masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat, kami pemerintah desa juga akan membuat kebijakan atau aturan yang nantinya bisa di taati bersama guna menjadikan desa ini desa yang sehat, namun itu semua dapat terlaksana apabila mendapat dukungan dari masyarakat. Untuk itu perlu adanya musyawarah terlebih dahulu untuk merealisasikan semua ini”.⁴⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku Kepala Desa, Desa Suka Maju dapat disimpulkan bahwasannya, penggunaan dana desa untuk pembuatan fasilitas penunjang terciptanya pola hidup sehat di masyarakat, perlu di barengi dengan adanya kebijakan atau aturan. Sehingga nantinya dapat di taati bersama. Karena apabila tidak di barengi dengan pembuatan kebijakan, tidak menutup kemungkinan kebiasaan dari masyarakat sulit untuk di hilangkan.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat di arahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat di pakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus di lakukan meningkatkan skill atau kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat mengatakan :

“Sumber Daya Manusia yang baik sangatlah diperlukan dalam terlaksananya program pembuatan jamban sehat, karena di perlukan seseorang yang mampu di arahkan guna memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, sehingga nantinya tidak ada kesalahpahaman atau kurangnya pemahaman dari si penerima manfaat itu sendiri dalam memanfaatkan bantuan yang telah di berikan”.⁵⁰

Hasil wawancara dengan Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat dapat di simpulkan bahwasannya, Sumber Daya Manusia yang baik sangat di butuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerataan jamban sehat, karena nantinya tim pelaksana inilah yang akan menjadi penyambung lidah antara masyarakat, tim fasilitator dan pemerintah desa.

Kelemahan Kebiasaan

Program STBM pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dari sisi sosial budaya di desa suka maju, salah satu faktor penghambatnya adalah perilaku masyarakat atau kebiasaan khususnya daerah yang dekat dengan rawa atau bantaran sungai. Kebiasaan merupakan salah satu faktor yang paling sulit di lakukan nya perubahan pada masyarakat, karena minimnya pengetahuan serta cara pandang yang masih tradisional. Rubiyanto selaku penerima manfaat mengatakan :

“Karena masyarakat masih memiliki faktor kebiasaan dan di anggap paling gampang dan tidak repot jika BABS di sungai. Selain itu, BABS di rawa juga sangat praktis tidak lagi mengeluarkan biaya untuk membuat jamban dan ini sudah menjadi kebiasaan”.⁵¹

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku Kepala Desa Suka Maju pada 01 April 2021 pukul 14.35

⁵⁰Wawancara dengan Fania Fujianti selaku Fasilitator Masyarakat dalam pelaksanaan program STBM di Desa Suka Maju 31 Maret 2021 pukul 11.25

⁵¹Wawancara dengan Bapak Rubiyanto selaku penerima manfaat di Desa Suka Maju 01 April 2021 pukul 15.00

Miranti^{1*}, Laveria Sekarina¹

Penerapan Program Sanitasi Total

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 4 No 1 Tahun 2022, p 73-96

Dari penjelasan wawancara saya dengan Bapak Rubiyanto dapat di simpulkan bahwasannya, kebiasaan masyarakat dalam BABS di rawa sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Selain karena lebih menghemat biaya juga lebih praktis. Dari kebiasaan buruk inilah yang menyebabkan STBM belum berjalan dengan baik. Ibu Fatimah selaku penerima manfaat mengatakan :

*“salah satu belum tercapainya program STBM khususnya pilar stop BABS adalah tidak tersedianya air. Karena tidak semua rumah memiliki akses air yang bagus. Karena ngapain harus angkut air dari sungai ke rumah untuk BAB di rumah. Lebih baik langsung saja BABS di sungai atau di rawa”.*⁵²

Dari penjelasan wawancara saya dengan Ibu Fatimah dapat di simpulkan bahwasannya, selain kebiasaan, ketersediaan air juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat lebih suka BABS di rawa karena di rasa lebih praktis dan mudah.

Kemampuan

Dalam Upaya merealisasikan tujuan pembangunan manusia melalui program sanitasi yang berhasil, selain dari Dana Desa, kebijakan pemerintah, juga harus di barengi oleh kemampuan dari sumber daya manusia nya sendiri dalam mengatasi permasalahan sanitasi yang ada. Karena apabila hanya tersedia dana dan kebijakan, sementara sumber daya manusia nya tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada semua akan terasa sia-sia. Mengenai kemampuan masyarakat dalam hal pembangunan tangki septic, hal ini di hubungkan dengan faktor ekonomi yang mayoritas masyarakat nya berpencaharian sebagai petani, khususya buruh tani. Selain dari faktor ekonomi, kemampuan masyarakat dalam pembangunan tanki septic ternyata juga di pengaruhi oleh pengetahuan mereka mengenai kesehatan lingkungan yang minim. Ibu Sri selaku penerima manfaat mengatakan :

*“jangan untuk membangun jamban yang layak, bisa untuk makan saja sudah alhamdulillah. Karena faktor ekonomi ini lah yang menuntut kami sekeluarga untuk BABS di rawa. Keinginan untuk memiliki jamban layak itu tentu saja ada, namun terkendala di biaya”.*⁵³

Dari penjelasan wawancara saya dengan Ibu Sri dapat di simpulkan bahwasannya, faktor ekonomi menjadi salah satu penghambat masyarakat untuk dapat menerapkan pola hidup sehat. Keterbatasan ekonomi menuntut masyarakat untuk BABS di rawa dan menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan yang sulit di rubah tanpa di barengi dengan tindakan atau upaya dari pemerintah. Ibu Fatimah selaku penerima manfaat mengatakan :

*“saya lebih nyaman menggunakan jamban cemplung daripada jamban sehat yang di berikan oleh pemerintah. Karena saya takut jika sewaktu-waktu nanti tanki nya meledak. Jadi sampai sekarang belum saya gunakan”.*⁵⁴

Dari penjelasan wawancara saya dengan Ibu Sri dapat di simpulkan bahwasannya, kurangnya pengetahuan dari masyarakat dan kurangnya sosialisasi khusus bagi para penerima manfaat menyebabkan kurang bermanfaatnya program yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pada aspek sosial ini, ada dua faktor yang menjadi kendala masyarakat masih berperilaku BABS yaitu faktor ekonomi dan faktor pengetahuan. Untuk itu perlu di adakannya penyuluhan atau pemicuan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan masyarakat.

Upaya dalam penerapan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Suka Maju

⁵²Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku penerima manfaat di Desa Suka Maju 02 April 2021 pukul 14.15

⁵³Wawancara dengan Ibu Sri selaku penerima manfaat di Desa Suka Maju 03 April 2021 pukul 16.00

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku penerima manfaat di Desa Suka Maju 02 April 2021 pukul 14.15

Bekerjasama antara pemangku kepentingan demi tercapainya Stop BABS, di perkuat dengan peraturan pemerintah desa tentang Stop BABS

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program sanitasi, perlu adanya kerjasama antara pemangku kepentingan seperti dari pihak pemerintah desa, masyarakat dan di dampingi baik oleh dinas kesehatan terkait. Melalui program penyuluhan di perkuat oleh perdes yang berkaitan dengan sanitasi. Dengan di keluakan kebijakan mengenai sanitasi, di harapkan bisa membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat dalam menuju hidup sehat. Sarwan selaku Ketua KSM mengatakan :

"karena semua keberhasilan program itu harus didasari komitmen yang kuat, jika kepala desa, tim Fasilitator, tim pelaksana dan masyarakat mempunyai kpmitmen yang sama, maka desa akan ODF".⁵⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Sarwan selaku Ketua KSM dapat di simpulkan bahwasannya, keberhasilan suatu program tidak lepas dari komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan. Karena apabila sudah di dasari oleh komitmen yang kuat, semua program akan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Penyuluhan dari dinas terkait, baik itu dari sanitarian atau dari dinas kesehatan tentang bahaya nya BABS bagi lingkungan

Terkait masalah sanitasi yang belum dapat di katakan layak, dalam hal ini dinas kesehatan dan pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting guna memperbaiki akses sanitasi yang ada. Terutama dari dinas kesehatan terkait, perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya sanitasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan penyuluhan di harapkan dalam memberikan informasi serta dapat merubah pola fikir masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang kurang baik terutama dalam hal BAB Sembarangan. Karena minim nya pengetahuan masyarakat inilah yang menjadikan masyarakat mengabaikan sanitasi dalam kehidupan sehari-hari. Chika Saputri selaku Sekretaris KSM mengatakan :

"Untuk menjadikan Desa yang ODF perlu adanya perubahan perilaku dari masyarakat, terkhususnya masyarakat awam yang kurang memahami akan bahaya dari kurangnya menjaga kebersihan lingkungan dan bahaya nya BABS. Untuk itu perlu adanya penyuluhan dari dinas terkait guna memberikan edukasi kepada masyarakat agar perlahan bisa merubah kebiasaan buruk dari masyarakat itu sendiri".⁵⁶

Hasil wawancara dengan Chika Saputri selaku Sekretaris KSM dapat di simpulkan bahwasannya, perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat guna merubah kebiasaan buruk dari masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Pendampingan masyarakat secara berkelanjutan dan terarah dari dinas kesehatan.

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Karena pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Sarwan selaku Ketua KSM tanggal 02 April 2021 pukul 15.10

⁵⁶Wawancara dengan Chika Saputri selaku Sekretaris KSM Tanggal 31 Maret 2021 pukul 16.00

Chika Saputri selaku Sekretaris KSM mengatakan :

“selain memberikan penyuluhan, masyarakat juga memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar nantinya masyarakat itu benar-benar tergerak hatinya untuk melakukan perubahan”⁵⁷

Hasil wawancara dengan Chika Saputri selaku Sekretaris KSM dapat di simpulkan bahwasannya, perlu adanya pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat dalam memperbaiki perilaku hidup sehat bukan hanya memberikan edukasi atau penyuluhan. Karena dapat kita ketahui bahwasannya tidaklah mudah untuk merubah perilaku atau kebiasaan dari masyarakat. Berkaitan dengan itu, pendampingan ini sebagai upaya untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang di dampingi dapat hidup secara mandiri.

Pembuatan atau pengadaan jamban sehat permanen

Jamban atau kakus merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Pembuatan jamban merupakan usaha manusia untuk memelihara kesehatan dengan membuat lingkungan tempat hidup yang sehat Dalam pembuatan jamban sedapat mungkin harus diusahakan agar jamban tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, konstruksi yang kokoh dan biaya yang terjangkau perlu dipikirkan dalam membuat jamban. Hari Anggoro selaku Kepala Desa, Desa Suka Maju mengatakan :

“untuk masyarakat yang tidak berani menggunakan jamban sehat yang telah di berikan oleh pemerintah, nantinya kami pemerintah desa akan membuatkan atau membangun jamban sehat namun tidak menggunakan tanki septic seperti yang telah di berikan oleh pemerintah”⁵⁸

Hasil wawancara dengan Hari Anggoro selaku Kepala Desa, Desa Suka Maju dapat di simpulkan bahwasannya, Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam terlaksana nya pembangunan jamban sehat. Pengadaan jamban sehat permanen ini sangat di perlukan khususnya bagi masyarakat yang hidup di bantaran sungai. Karena masyarakat yang hidup di bantaran sungai cenderung memiliki kebiasaan yang turun temurun yaitu dengan BAB sembarangan. Selain dapat mencemari lingkungan, BAB Sembarangan juga dapat menimbulkan penyakit. Untuk itu, pemerintah indonesia telah menetapkan kebijakan nasional pembangunan air minum dan sanitasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan sanitasi sebagai upaya untuk mencapai akses universal. Sebagai upaya untuk memperbaiki sanitasi terutama pilar pertama.

Pembiayaan dari dana desa, dana daerah, DAK pusat

Sumber pembiayaan kegiatan sanitasi ini dapat berasal dari beberapa sumber pembiayaan, antara lain dana desa, dana daerah dan DAK pusat. Sanitasi dan air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus di penuhi. Keduanya saling berkaitan. Penyediaan fasilitas sanitasi layak sangat tergantung pada ketersediaan air minum yang layak. Begitupun sebaliknya, untuk mendapatkan air minum yang aman di perlukan upaya pengelolaan sanitasi yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk memperbaiki akses sanitasi yang layak yaitu dengan mengucurkan dana desa guna untuk meringankan masyarakat atau membantu masyarakat untuk pembangunan sarana air minum dan akses sanitasi yang lainnya seperti pembangunan tempat pembuangan sampah masyarakat, pembangunan jamban sehat, dan penyediaan sarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) di tempat-tempat umum seperti pasar, mushola. Hari Anggoro selaku Kepala Desa, Desa Suka Maju mengatakan :

⁵⁷Wawancara dengan Chika Saputri selaku Sekretaris KSM Tanggal 31 Maret 2021 pukul 16.00

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku Kepala Desa, Desa Suka Maju Tanggal 01 April 2021 pukul 14.35

*“pembuatan sarana sanitasi seperti pembuatan CTPS, pemerataan penggunaan jamban, pembuatan tempat pembuangan sampah akhir dengan memanfaatkan dana desa, selain itu juga bisa memanfaatkan Dana Daerah dan DAK Pusat”.*⁵⁹

Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku Kepala Desa dapat di simpulkan bahwasannya, pembangunan sarana sanitasi bukan hanya menggunakan Dana Desa, melainkan juga menggunakan Dana Daerah dan DAK Pusat. Karena apabila hanya menggunakan Dana Desa, di rasa belum cukup mengingat banyak nya jumlah penduduk di Desa Suka Maju. Selain dari dana desa, pembanguan sarana sanitasi juga berasal dari Dana Daerah dan DAK Pusat. Pada saat pembukaan konferensi Sanitasi Nasional kedua yang di laksanakan pada tanggal 8 Desember 2009 program ini telah diluncurkan sebagai Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Upaya PPSP ini membutuhkan dukungan nyata yang terintegrasi dari berbagai sektor terkait di lapisan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun masyarakat. Kegiatan pembangunan sanitasi sudah menjadi urusan wajib bagi kabupaten dan kota, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengembangkannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan layanan masyarakat di daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan kewenangan wajib tersebut, penting bagi pemerintah daerah mencari peluang penggalan sumber-sumber yang tidak hanya terbatas pada kemampuan dukungan APBD. Mobilisasi dapat dimungkinkan pula dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersumber dari pemerintah provinsi melalui APBD-Provinsi, dan pemerintah melalui APBN, serta sumber-sumber lain dari swasta, masyarakat dan donor.

Pendataan secara menyeluruh melalui penyebaran peta sanitasi

Langkah awal penanganan masalah sanitasi dimulai dari pendataan. Peta sanitasi adalah peta yang di buat untuk menentukan lokasi rumah, sumber daya yang tersedia dan permasalahan sanitasi yang terjadi dalam bentuk gambar. Sarmidi selaku Anggota KSM Desa Suka Maju mengatakan :

*“Dengan adanya pemetaan sanitasi ini memudahkan dalam pendataan masyarakat yang belum memiliki jamban. Pasalnya dalam peta sanitasi di beri tanda sebagai pembeda antara masyarakat menengah kebawah, dan masyarakat menengah atas sehingga memudahkan tim pelaksana ketika akan melakukan pendataan”.*⁶⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Sarmidi selaku Anggota KSM Desa Suka Maju dapat disimpulkan bahwasannya, dengan adanya pemetaan sanitasi memudahkan tim pelaksana dalam mendata masyarakat yang belum memiliki akses jamban sehat.

Pengawasan atau pemantauan secara intensif oleh fasilitator di bantu oleh pemdes demi tercapainya jamban sehat permanen

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan di lakukan sepanjang siklus program, dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Hasil kegiatan pemantauan di gunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Sarmidi selaku Anggota KSM Desa Suka Maju mengatakan :

*“pengawasan ini bertujuan untuk melihat sejauh apa kesadaran masyarakat dalam proses pemicuan sehingga terpicu untuk merubah pola hidup. Selain itu juga untuk melihat apakah jamban yang sudah di buat sudah di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat”.*⁶¹

Hasil wawancara dengan Bapak Sarmidi selaku Anggota KSM Desa Suka Maju dapat disimpulkan bahwasannya, pemantauan bertujuan untuk melihat sejauh mana proses pemicuan

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Hari Anggoro selaku Kepala Desa, Desa Suka Maju Tanggal 01 April 2021 pukul 14.35

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Sarmidi selaku Anggota KSM pada 03 April 2021 pukul 15.00

⁶¹Wawancara dengan Bapak Sarmidi selaku Anggota KSM pada 03 April 2021 pukul 15.00

dapat merubah perilaku masyarakat dan bertujuan untuk memantau dalam proses pelaksanaan program bantuan apakah berjalan sesuai prosedur atau tidaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada sebelumnya mengenai Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu yaitu Penerapan program STBM, Identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penerapan program STBM bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada suatu daerah yang dalam akses sanitasinya masih bisa di katakan kurang layak. Selain untuk mengetahui permasalahan, juga untuk mencari solusi agar daerah tersebut mendapatkan akses sanitasi yang layak. Pemetaan sanitasi: Pemetaan sanitasi adalah kegiatan partisipatif untuk menggambarkan masyarakat tentang kondisi terkini atau untuk mengetahui lokasi atau daerah yang masih bisa di katakan belum layak dalam akses sanitasinya, dengan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat yang ada pada masyarakat tersebut.

Pemicuan ini merupakan metode yang menumbuhkan partisipasi masyarakat secara aktif dengan pengetahuan mereka di harapkan masyarakat mampu membuat rencana mengenai kondisi sanitasi mereka. Pemicuan berbeda dengan penyuluhan, karena masyarakat di tuntut untuk lebih aktif dalam program Stop BABS ini. Penyusunan RKM dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan penyusunannya, baik manajemen maupun teknis, pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis dibantu oleh TFL Teknis sebagai pendamping, dengan tetap melibatkan masyarakat. Dalam penerapan program STBM pilar pertama, dalam proses pelaksanaannya melibatkan masyarakat langsung. Kontribusi dari masyarakat sangat di perlukan dalam kegiatan ini, dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Pemantauan. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang akan dilakukan secara terus menerus untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan dilakukan di sepanjang siklus program, dimulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Upaya yang dilakukan dalam penerapan program STBM: Bekerjasama antara pemangku kepentingan demi tercapainya Stop BABS, di perkuat dengan peraturan pemerintah desa tentang Stop BABS, Penyuluhan dari dinas terkait, Pendampingan masyarakat secara berkelanjutan dan terarah dari dinas kesehatan, Pembuatan atau pengadaan jamban sehat, Pembiayaan dari dana desa, dana daerah dan DAK Pusat, Pendataan secara menyeluruh melalui penyebaran sanitasi, Pengawasan dan pemantauan secara intensif oleh fasilitator.

Saran dari penulis adalah sebagai berikut: Mengingat begitu besarnya pengaruh STBM pada masyarakat untuk mencapai pola hidup yang sehat, maka di sarankan kepada pihak-pihak terkait dalam hal peningkatan STBM (masyarakat dan pemerintah desa) agar sama-sama saling merubah kebiasaan dalam kehidupan berkaitan dengan sanitasi atau kesehatan karena apabila lingkungan itu terjaga baik kesehatan maupun keamanannya, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman. Maka dari itu perlu adanya kerjasama yang baik antar pemerintah desa dan masyarakat dalam hal saling mendukung program yang di kururkan oleh pemerintah daerah maupun pusat guna meningkatkan akses sanitasi. Karena suatu program tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan perubahandari masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menerapkan STBM lima pilar dalam kehidupan sehari-hari. Karena kurangnya pengetahuan dan informasi inilah yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui bahaya dari akses sanitasi yang kurang baik. Bagi peneliti mendatang sebaiknya dalam melakukan penilaian kinerja atau dalam proses pelaksanaan STBM tidak hanya berpedoman dengan aturan yang sudah di tetapkan namun juga melihat situasi dan kondisi di lapangan selain itu juga berpedoman pada Modul STBM karena di dalamnya memuat keseluruhan proses dalam pelaksanaan kegiatan. Bagi pihak pemerintah desa sebaiknya di lakukan peninjauan ulang kepada penerima manfaat untuk mengetahui adanya permasalahan atau hambatan setelah selesai pelaksanaan program. Agar program bantuan yang sudah di sediakan oleh pemerintah dapat di gunakan denganbaik atau sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulasyani. 2012:*Sosiologi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggara, Sahya: 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Awang, Azam. 2010:*Impelentasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2011:*Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Herimanto dan Winarno. 2017: *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta timur: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012:*Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Solekhan, Moch. 2014:*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2017:*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Winarno, Budi .2012: *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps.
- E-BOOK “Kurikulum dan Modul pelatihan Fasilitator STBM, 2014”
- E-BOOK “Dirjen Cipta Karya ttg Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi 2018”
- Zuraini A, Juanda. 2017: Strategi Perubahan Perilaku Pemilihan Septic Tank di Permukiman Daerah Rendah. Vol. 14, No 2. <https://ejournal.kesling-poltekkesbjm.com/index.php/JKL/article/view/71> (Selasa, 01 Juni 2021, Pukul 20.000
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang- Undang No 23 tahun 1992 tentang ruang lingkup kesehatan lingkungan
- <http://lib.unnes.ac.id/28128/1/6411411249.pdf> (diakses pada 03 November 2020, jam 21.25)
- <https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash>(diakses pada 24Desember 2020, jam 22.32)
- [https://jambi.bps.go.id/dynamictable/2019/10/08/1350/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jambi-2015-2018-\(diakses-pada-26Desember-2020,-jam-20.14](https://jambi.bps.go.id/dynamictable/2019/10/08/1350/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jambi-2015-2018-(diakses-pada-26Desember-2020,-jam-20.14)
- <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html?m=1> (diakses pada 06 Desember 2020, jam 13.36)
- <https://tebokab.go.id/page/strategi-kebijakan.html> (diakses pada 07 Desember 2020, jam 21.45)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan_masyarakat (diakses pada 07 Desember 2020, jam 22.00)
- <https://www.gurupendidikan.co.id/kesehatan-lingkungan/> (diakses pada 08 Desember 2020, jam 09.00)